



Anggota Dewan Minta ✓

Pendataan Naker Asing Diintensifkan

Gianyar (Bali Post) -

Pemerintah diminta melakukan pendataan intensif terhadap tenaga kerja (naker) asing di wilayah Kabupaten Gianyar. Pasalnya, sejauh ini disinyalir masih banyak perusahaan yang mempekerjakan naker asing tanpa izin, sehingga berimbas pada pendapatan retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Hal itu diungkapkan anggota Komisi III DPRD Gianyar Luh Suciningsih.



Bali Post/ded

Luh Suciningsih

Menurutnya, salah satu permasalahan ketenagakerjaan di Gianyar adalah menyangkut pendataan naker asing. Naker asing haruslah mengantongi sejumlah dokumen resmi sebelum bekerja di suatu perusahaan. Pihak perusahaan pun harus memiliki IMTA agar bisa merekrut naker asing. Sedangkan retribusi IMTA per naker asing adalah 100 USD per bulan atau 1.200 USD per tahun.

Namun sayangnya, disinyalir tidak sedikit perusahaan yang mempekerjakan naker asing tanpa IMTA. Hal ini jelas merugikan lantaran potensi retribusinya tidak dapat diraih. "Kalau didata dengan jelas, pasti banyak naker asing bekerja di Gianyar. Contohnya saja di salah satu perusahaan di Ubud, bisa mempekerjakan orang asing sampai 3 orang," kata Suciningsih, belum lama ini.

Dikatakannya lebih lanjut, retribusi IMTA memang bukanlah sumber pendapatan daerah yang besar. Pasalnya, pendapatan dari retribusi IMTA itu digunakan terutama untuk pelatihan dan pembinaan bagi tenaga kerja di daerah. Namun, tetap saja hal ini harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Potensi retribusi IMTA diharapkan dapat digarap semaksimal mungkin.

"Mengenai retribusi IMTA ini kami akan pertanyakan pada rapat kerja nanti. Yang jelas, kami minta pendataan tenaga kerja asing harus dilakukan secara rutin dan intensif agar pemerintah tidak kecolongan," ujar politisi PDI-P ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gianyar Gede Widarma Suharta beberapa waktu lalu menyebutkan, hingga bulan Juni, retribusi IMTA yang telah dipungut mencapai sekitar Rp 400 juta dari sekitar 30 naker asing. Pihaknya menargetkan retribusi IMTA sekitar Rp 700 juta di tahun 2015. (kmb25)

Edisi : Senin, 28 September 2015

Hal : 9



Defisit Rp 126 Miliar Lebih DPRD Karangasem Sahkan APBD-P 2015

SEMUA fraksi di DPRD Karangasem setuju Ranperda APBD Perubahan 2015 disahkan menjadi perda, dan semua masukan dewan mengikat dilaksanakan. Pimpinan dewan menyatakan APBD-P tahun ini defisit sebesar Rp 126,9 miliar lebih. Namun defisit itu ditutupi dengan sisa lebih perhitungan tahun lalu.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi, S.E., M.Si., Minggu (27/9) kemarin di Karangasem. Dikatakan, setelah perda itu disahkan segera disampaikan ke Gubernur Bali untuk dilakukan verifikasi. Harapannya, APBD-P bisa lebih cepat dilaksanakan sesuai mekanisme.

Sumardi asal Desa Sibetan itu

mengatakan, pendapatan pada APBD-P dirancang Rp 1,369 triliun lebih, sementara belanja daerah Rp 1,496 triliun lebih.

Pada sidang paripurna Dewan yang dihadiri Penjabat Bupati Karangasem Ida Bagus Ngurah Arda, Muspida dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Karangasem. Saat itu juga disampaikan hasil rapat gabungan komisi terkait musim kemarau dan banyaknya warga krisis air bersih, pengadaan air bersih yang dianggarkan di Dinas Sosial Karangasem dengan pengajuan anggaran Rp 20 juta digeser. Sementara pengadaan air yang sudah dianggarkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karangasem di-

minta dilaksanakan dengan baik. "Semua anggaran yang disusun di APBD-P 2015 sudah melalui mekanisme yang benar agar dijalankan. Sebaliknya anggaran yang tak sesuai mekanisme agar dikeluarkan," tegas Nyoman Ada yang membacakan laporan hasil rapat gabungan komisi.

Pada rapat gabungan komisi juga banyak dibahas soal pelaksanaan pemilihan perbekel (pilkel) serentak. Pada 31 Oktober ini sudah bisa direncanakan pilkel serentak. Masalahnya, tahun sebelumnya pilkel ditiadakan karena pileg diikuti pilpres. Akibatnya, lebih 40 desa dari 75 perbekelan di Karangasem yang sudah lama tak memiliki perbekel definitif hasil pilkel langsung. Saat ini lebih



DISAHKAN - Anggota DPRD Karangasem berdiri saat pengesahan APBD-P 2015.

dari 42 perbekelan dijabat penjabat sementara yang ditugasi dari staf di kantor camat.

Sementara itu, PDI-P, NasDem, Bhineka dan Demokrat di DPRD Karangasem mendesak eksekutif yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) bisa melaksanakan pilkel sesuai jad-

wal. Fraksi Partai Golkar menyatakan menyerahkan pilkel itu kepada eksekutif, sedangkan Fraksi Gerindra berpendapat, anggaran pilkel tetap dianggarkan. Namun jika tahapannya tak memenuhi waktu yang masih tersisa tahun ini, diharapkan pilkel digelar tahun depan. (ad1523)

Edisi : Senin, 28 September 2015

Hal : 13



Dugaan Korupsi Jalan Prof. Mantra

BPN Gianyar Mesti Ikut Jadi Tersangka

BEBERAPA waktu lalu, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali membenarkan bahwa ada penambahan tersangka untuk kasus pembebasan lahan Jalan Prof. Ida Bagus Mantra. Hanya, baru satu yang diumumkan tersangkanya yakni Bw alias Bawa. Yang menarik, dalam gelar perkara beberapa hari yang lalu, selain menetapkan empat orang tersangka yang perannya sangat kecil, ekspos menyatakan bahwa pihak BPN Gianyar mestinya ikut dijadikan tersangka. Hanya, hingga Jumat (25/9) nama BPN belum tersentuh karena tersangkanya masih empat orang.

Mereka adalah Wayan Bawa, yang sudah dijadikan tersangka sejak tahun 2011. Atas hal ini, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Aditya Warman sempat melontarkan bahwa kasus ini seperti kasus ulang tahun alias berulang-ulang karena bertahun-tahun mandek. Tiga tersangka lain adalah Kades Keramas I Gede Wayan Bisma. Dia berperan menandatangani surat pernyataan penguasaan tanah, dengan posisi mengetahui. Yang membuat adalah Bawa, sementara Kades Bisma hanya mengetahui. Tersangka lainnya adalah Kepala Dusun (Kadus) Palak Desa Keramas I Wayan Sudiasa dan tersangka keempat adalah I Made Surna, juga seorang Kadus Palak, Desa Keramas.

Kadus ini, sebut salah seorang sumber kejaksaan, sejatinya perannya sangat kecil. Bahkan, terkesan dibohongi karena hanya diminta tanda tangan mengetahui. Kadus ini hanya ikut sebagai saksi dalam proses surat penguasaan lahan. Hadir sejumlah ahli di antaranya ahli pidana Gusti Ariawan, ahli pertanahan Cok Dalem Dahana dan ahli hukum administrasi negara Gede Sumertayasa. "Tiga ahli ini berpendapat sama," jelasnya. Ketiga ahli tadi berpendapat bahwa yang bertanggung jawab atas warkah tanah adalah BPN, dan memastikan semestinya unsur BPN menjadi tersangka. Sebelumnya, salah seorang penyidik Kejati Bali saat mendampingi Ashari Kurniawan membenarkan bahwa Kejati Bali menetapkan empat orang tersangka. Bahkan saat penetapan kasus ini sebagai tersangka, sempat terjadi perbedaan pendapat. Namun karena ada tanda tangan, maka secara yuridis diminta ikut bertanggung jawab. Selain itu, pihak BPN juga dimintakan ikut bertanggung jawab.

Kasus ini bermula saat ada pembebasan lahan untuk membangun Jalan By-pass Prof. I.B. Mantra. Lahan milik Bawa sudah dijual ke warga Tionghoa bernama Renaya Parwita. Dari Renaya Parwita ini, lahan dijual ke pemerintah untuk by-pass. Kemudian, tanah sisa dari pembebasan itu juga sudah menjadi aset negara. Namun, Bawa memiliki niat nakal.

Aset itu kembali disertifikatkan. Anehnya, malah muncul sertifikat dari BPN Gianyar. Proses administrasi melibatkan kepala desa dan kadus, sehingga kades dan kadus ikut jadi tersangka. Setelah mendapatkan tanah sisa dengan luas 5 are ini, dipecah oleh Bawa untuk dijual 2,5 are dibeli oleh Cangker dan 2,5 are dibeli oleh Marina. Atas kondisi ini, Bawa merugikan keuangan negara lantaran menjual aset negara. (asa)

Edisi : Senin, 28 September 2015

Hal : 3



Jadi Temuan

Tunggakan PBB

Capai Rp 19,6 Miliar

Bangli (Bali Post) -

Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum berhasil ditagih Dinas Pendapatan (Dispenda) Bangli mencapai Rp 19,6 miliar. Hal ini sempat menjadi temuan Inspektorat Bali. Sebagai tindak lanjut, Pemkab Bangli akan membentuk tim penagih piutang.

Kadispenda Bangli Gd. Suryawan belum lama ini menjelaskan tunggakan pajak yang menjadi temuan inspektorat ini merupakan data yang didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pusat. Pada awal 2014 lalu, data itu diserahkan KPP ke Pemkab Bangli dan pihaknya

mulai melakukan penyisiran, sehingga saat serah terima kewenangan pemungutan pajak dan sesuai berita acara, tunggakan hanya Rp 11 miliar. "Yang delapan miliar sudah disisir," terangnya.

Kata Suryawan, untuk mempercepat penyelesaian persoalan

ini, BPK juga sempat meminta pihaknya untuk melakukan klarifikasi dan validasi data yang diperkirakan mencapai 99 ribu lebih dan tersebar di seluruh kecamatan. Upaya ini dimaksudkan untuk mengetahui identitas terbaru dari pembayar pajak. Setelah validasi dilaku-

kan, pihaknya akan membentuk tim penyelesaian piutang dengan melibatkan sejumlah SKPD.

"Data yang kami validasi lebih dari 99 ribu. Yang divalidasi seperti berapa luas tanah, pemilik terbarunya siapa dan lokasinya di mana. Di samping itu, kami akan bentuk tim," jelasnya.

Disampaikan juga, validasi ini akan melibatkan aparat desa. Sebelum terjun, aparat desa ini akan diberikan bimtek dengan maksud agar validasi dapat dilakukan secara maksi-

mal. "Tahun ini kami fokuskan untuk bimtek. Tahun 2016 kami langsung bergerak dan validasi harus tuntas," katanya.

Mantan Kepala Inspektorat Daerah Bangli ini juga mengatakan sambil menunggu langkah selanjutnya, pihaknya juga sudah melakukan penyisiran tunggakan pajak ini dan berhasil menagih Rp 1 miliar. "Beberapa tunggakan piutang sudah berhasil ditagih. Sekarang sisa Rp 10 miliar. Kami akan terus telusuri," cetusnya. (kmb45)

Edisi : Senin, 28 September 2015

Hal : 8